

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi (2019), *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin (2003), *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arba (2017), *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ateng Syafrudin (1992), *Pengurusan Perizinan*, Bandung, Pusat Pendidikan dan Pelatihan St. Alosius.
- Azhary (2019), *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Boedi R. et. All (2015), *Jalan Panjang Reformasi Perizinan Berusaha*, Paparan Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Asian Development Bank.
- Hotma P. Sibuea (2013), *Ilmu Negara*, Jakarta, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Hans Kelsen (2014), *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung; Nusa Media.
- Jimly Asshiddiqie (2011), *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat (2019), *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung, Nuansa Cendekia.
- Juniarso R. dan Achmad S. (2016), *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung, Nuansa.
- Maria SW. Sumardjono (2014), *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Miriam Budiardjo (1982), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.
- Muchsan (1981), *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad (2014), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nomensen Sinamo (2014), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Jala Permata Aksara.

- Noer Fauzi (2003), *Otonomi Daerah Sumber Daya Alam Lingkungan*, Jakarta, Lipera Pustaka Utama.
- Nur Basuki Winanmo (2008), *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama.
- Philipus M. Hadjon et. al. (1990), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, UGM Press.
- Prajudi Atmosoedirjo (1982), *Administrasi dan Manajemen Umum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ridwan H.R. (2018), *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Sri Soemantri, (1992), *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni.
- SF. Marbun (1997), *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1990), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Soerjono Soekanto (2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2011), *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajagrafino Persada.
- Sri Soemantri (1992), *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi

C. Karya Ilmiah/Makalah/Jurnal

- Monika Suhayati, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (2018) Info Singkat Bidang Hukum, *Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Submission System)* Vol. X No.23/I/Puslit/Desember/2018, 1-6.
- Desi Ariani Arrum, (2019), *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia* Jurnal Jurist-Diction Vol. 2 No. 5.
- Badan Pusat Statistik (2020), Berita Resmi Statistik. *Pertumbuhan Ekonomi*, No. 17/02/Th XXII tanggal 5 Februari 2020.
- Boedi R. *et. all.* (2015), *Jalan Panjang Reformasi Perizinan Berusaha*, Paparan Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Asian Development Bank.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2018), *Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha.*#, Jakarta.
- Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (2019), *Evaluasi satu tahun OSS, Studi Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 di Daerah.*

- M. Hamdani P. *Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*, Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Airlangga Vol. 3 No. 3, hlm 90, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp1060d28347full.pdf>
- Margaretha Quina dan Angela Vania, *Perizinan Lingkungan Melalui Online Single Submission*, Seri Lembar Informasi | Perizinan Lingkungan & OSS | April 2019 #1
- Monika Suhayati, *Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Submission System)*, Info Singkat, Vol. X, No.23/I/Puslit/Desember/2018
- Philipus M Hadjon (1993), "*Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi*" Jurnal Yuridika No. 1 dan 2 Tahun VIII, Jan-Feb-Apr, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Rastri Paramita, *Perizinan Berbelit, Investasi Sulit*, Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI dalam Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Edisi 9 Vol. II. Mei 2017
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1989), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Vica J. E. Saija, *Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup*, Jurnal Sasi Vol.20 No.1 Bulan Januari-Juli 2014.

D. Internet

- Ari Muliarti G. & Galuh P. (2013), *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Sektor Keuangan Terhadap Pengurangan Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol. 4, No. 2, jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/167, diakses 10 Okt 2019
- Berita Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2019, *Komisi VI Pertanyakan Implementasi OSS* (online) <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25314/t/Komisi+VI+Pertanyakan+Implementasi+OSS> (accessed ; 9 September 2019)
- EasyBiz, dari <https://www.easybiz.id/poin-poin-penting-dalam-proses-pengajuan-izin-usaha-melalui-oss/> pada 17 Desember 2020
- Berita KPK, diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1606-masih-rawan-korupsi-kpk-beri-rekomendasi-benahi-perizinan>, pada 17 Desember 2020
- Fitri Noviani H. (2019, November) *Masalah Perizinan Masih Jadi Hambatan Sektor Investasi*, <http://hukumonline.com> diakses 14 Juli 2020
- Jakarta Bisnis, diakses dari <https://jakarta.bisnis.com/read/20190128/384/883299/dki-enggan-putuskan-penerapan-oss-sebelum-rapat-ke-menko-perekonomian>, diakses pada 17 Desember 2020

- Koran Republika, *Korupsi Sektor Perizinan Jadi Terbesar Kedua Ditangani KPK*, [https:// www.republika.co.id](https://www.republika.co.id), diakses tanggal 12 Februari 2020
- Lembaga OSS, *Informasi petunjuk pengisian*, www.oss.go.id/portal/, diakses Juli 2020
- Lembaga Online Single Submission, *Petunjuk Teknis Pengisian Non Perseorangan Online Single Submission*, diakses dari https://oss.go.id/portal/home/download/pdf/UM_Non_Perseorangan.pdf pada 16 Desember 2020
- Liputan6.com, Komite Pemantau Temukan Banyak Masalah di Sistem Pelayanan Terpadu <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4059902/komite-pemantau-temukan-banyak-masalah-di-sistem-pelayanan-terpadu> Reporter: Dwi Aditya Putra Editor :Angga Yuniar, diakses pada 9 September 2019
- Liputan 6, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4060047/komite-pemantau-temukan-ada-daerah-belum-terapkan-perizinan-terpadu> pada 17 Desember 2020
- Pernyataan Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin, M Yamin, dikutip dari <https://redkal.com/perizinan-melalui-oss-permudah-pelaku-usaha/> pada 17 Desember 2020.
- Pernyataan Pers Kepala BKPM Thomas Lembong, SIARAN PERS, diakses dari https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siara_n_pers/Siaran_Pers_BKPM_290618_Pernyataan_Kepala_BKPM_Terkait_OSS.pdf
- Siaran pers BPKM, Bahlil: Perizinan dan Insentif Investasi akan Ditangani BKPM, https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siara_n_pers/Siaran_Pers_BKPM_191119_Perizinan_dan_Insentif_Investasi_Ditangani_BKPM.pdf tanggal 13 Desember 2020
- Tribunnews, <https://surabaya.tribunnews.com/2019/08/27/warga-tulungagung-nilai-izin-usaha-ternak-bebek-yang-dikeluarkan-pemerintah-pusat-rugikan-masyarakat>, diakses pada 13 Desember 2020
- Yudha, R. 2019. *Keluhan Pengurusan OSS* (online) [www. Lapor.go.id](http://www.Lapor.go.id) (accessed ; 9 September 21019)